

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, 2009 *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Santosa, 1993, "*Analisis Kebijaksanaan Publik; Suatu Pengantar*". Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta, Gramedia
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing*, Jakarta, Sinar Grafika.
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta .
- Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- M. Imam Santoso, 2012, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005, *Hukum Pemerintahan daerah*, cetakan pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia..

Soekanto Soerjono. Mamuji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2006.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Perpajakan

UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

PP No. 31 Tahun 2013, Tentang Prosedur Pemerintahan dan Penyampaian Keputusan Hukuman.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05.PR.07.04  
tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang pembentukan Kantor  
Imigrasi Klas II Bukittinggi

### **C. Sumber Lain**

Lalu Subardi, Otonomi Daerah Studi tentang Pengelolaan Pesisir, Laut,  
dan Terumbu Karang. Jurnal Konstitusi Volume I No. 1 November  
2012

[http://id.shvoong.com/internet-andtechnologies/2119539-pengertian-  
pengolahan-data/](http://id.shvoong.com/internet-andtechnologies/2119539-pengertian-pengolahan-data/) diakses tanggal 26 April 2014.

[Bappebti.go.id/regulation/laws/detail/24.html](http://Bappebti.go.id/regulation/laws/detail/24.html) diakses pada 22 mei 2014.

